

# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

2024



# KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Pelatihan (Puslatluh) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2024.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Puslatluh KP tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Puslatluh KP tahun 2020-2024, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Puslatluh KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama triwulan I tahun 2024, Puslatluh KP telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dan 27 Indikator

Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2024, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Puslatluh KP.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pada bidang pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya selama triwulan I pada tahun 2024.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Puslatluh KP Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Puslatluh KP, dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 26 April 2024

**Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan  
KP,**



**Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan visi dan misi Presiden Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong.

Kementerian Kelautan dan Perikanan siap melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia (SDM);
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Menghapus kendala regulasi;
4. Menyederhanakan birokrasi, dan;
5. Melakukan transformasi ekonomi.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 mempunyai target PK untuk pelatihan sebanyak 35.173 orang masyarakat yang dilatih, 1.450 orang SDM KP yang bersertifikat kompetensi, 5 Materi Pelatihan berbasis Kaji Widy, 8 NSPK, 7 Lembaga Pelatihan dan Penyuluhan tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan,

pelatihan aparatur 5.165 orang, sarana pelatihan dan penyuluhan KP 6 unit, prasarana pelatihan dan penyuluhan KP 5 unit dan 12.264 orang Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, 47.500 Kelompok pelaku utama yang disuluh, serta 35 Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan juga 12 Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti.

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada triwulan I tahun 2024 adalah 118,57% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Capaian Penetapan Kinerja Puslatluh KP Tahun 2024 dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan tersedianya lulusan pelatihan kelautan dan perikanan

sesuai standar kompetensi dan kebutuhan. Capaian kinerja Puslatluh KP pada Triwulan 1 ini adalah:

1. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang) dengan target triwulan I sebanyak 13.708 orang dan capaian sebesar 17.708 orang (120%);
2. Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar) dengan target triwulan I sebanyak Rp1,88 Milyar dan capaian sebesar Rp 3,88 Milyar (120%);
3. SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang) dengan target triwulan I sebanyak 34 orang dan capaian sebesar 354 orang (120%);
4. Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh dengan target triwulan I sebanyak 6.900 kelompok dan capaian 8.277 kelompok (119,96%);
5. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target triwulan I sebanyak 385 Kelompok dan capaian sebesar 547 Kelompok (120%);
6. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok) dengan target triwulan I sebanyak 17 Kelompok dan capaian sebesar 25 Kelompok (120%);
7. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target triwulan I sebanyak 670 orang dan capaian sebesar 1.674 orang (120%);
8. Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target TW I sebanyak 2 kerjasama dan capaian 4 kerjasama (120%);
9. Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan target TW I sebanyak 25% dan capaian sebesar 30% (120%);
10. Persentase unit kerja Puslatluh KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target 94% dan capaian sebesar 106,94% (113,8%);

11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP dengan target 82 dan capaian 82 (100%).

Anggaran kegiatan Puslatluh KP dan UPT/Satminkal lingkup Puslatluh KP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp.730.184.111.000,-. Berdasarkan data realisasi keuangan pada aplikasi SAKTI, sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, bahwa pesentase realisasi keuangan dan fisik UPT/Satminkal lingkup Puslatluh KP pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 170.576.006.480,- (23,80%) dan persentase realisasi keuangan dan fisik Puslatluh KP senilai Rp2.279.600.356,- (16,06%) dari pagu anggaran Rp17.042.302.000,- .

Dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2024 capaian kinerja *output* program sudah semuanya tercapai, namun demikian untuk menghasilkan kualitas hasil kinerja yang optimal dimasa-masa mendatang dalam penyelenggaraan program perlu melakukan berbagai hal analisa sebagai berikut:

1. IKU Kelompok yang ditingkatkan kelasnya dan IKU Kelompok yang dibentuk dan IKU lainnya yang pengukurannya tahunan perlu dimonitoring secara berkala oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Satminkal agar capaian akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
2. Verifikasi data dukung yang ribuan memerlukan SDM dan Aplikasi digital dalam verifikasi data dukungnya serta adanya monitoring data dukungnya secara bulanan.

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## RINGKASAN EKSEKUTIF

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Tugas dan Fungsi	3
	1.4 Keragaan SDM	5
	1.5 Potensi Permasalahan	9
	1.6 Sistematika Pelaporan	12
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>14</b>
	2.1 Rencana Strategis 2020-2024	14
	a. Visi	
	b. Misi	
	c. Tujuan	
	d. Sasaran Strategis	
	e. Potensi dan Permasalahan	
	2.2 Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden	15
	2.3 Tujuan	16
	2.4 Sasaran Strategis	16
	2.5 Perencanaan Kinerja	21
	2.6 Rencana Kerja Tahunan	24
	2.7 Pengukuran Kinerja	25
	a. Rumus Pengukuran	
	b. Metode Pengukuran	
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>30</b>
	3.1 Prestasi Kinerja	30

3.2	Evaluasi dan Analisis Kinerja	31
3.3	Akuntabilitas Keuangan	83
3.4	Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	85
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>87</b>
4.1	Capaian Kinerja Utama	87
4.2	Rekomendasi dan Permasalahan	87
<b>LAMPIRAN</b>		<b>89</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada triwulan I tahun 2024 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPSDM KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program riset dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BPPSDM KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP triwulan I Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai Puslatluh KP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Puslatluh KP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan laporan kinerja triwulan I tahun 2024 ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sampai dengan triwulan I Tahun 2024, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Triwulan I Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP kepada Kepala BPPSDM KP selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2024;
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Triwulan I Tahun 2024 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala BPPSDM KP selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP;
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Puslatluh KP.

### **1.3 Tugas dan Fungsi**

- a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5/PERMEN-KP/2024, BPPSDM merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPPSDM didukung oleh unit kerja eselon II terdiri dari Sekretariat BPPSDM, Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan dan Pusat Pendidikan. Sampai Triwulan I Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020 sehingga tugas fungsi masih menggunakan Pusat Pelatihan dan

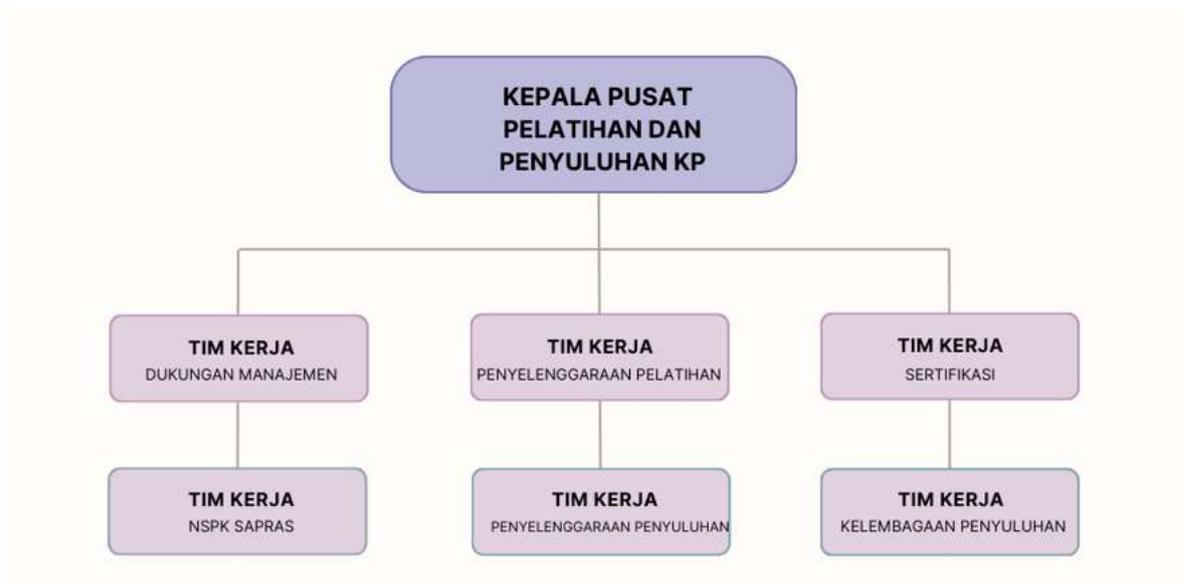
Penyuluhan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3) Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

c. Susunan Organisasi



## 1.4 Keragaan SDM

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP merupakan salah satu unit kerja dari Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM KP yang mampu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, dengan misi:

- 1) Mengembangkan kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, dan
- 2) Mengembangkan SDM kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Puslatluh KP dibantu oleh 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan, yaitu Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan-Sumatera Utara, BPPP Tegal-Jawa Tengah, BPPP Banyuwangi-Jawa Timur, BPPP Bitung-Sulawesi Utara, dan BPPP Ambon-Maluku.

Kebijakan Kepala Puslatluh KP berkaitan dengan strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan adalah:

- 1) Untuk pelatihan bagi Aparatur, mengutamakan diklat mandatory, yaitu diklat prajabatan dan diklat bagi calon tenaga fungsional;
- 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai KKP untuk mendapatkan diklat;
- 3) Mendorong adanya pengembangan jenis dan metode pelatihan dan penyuluhan;
- 4) Mengupayakan perencanaan pelatihan dan penyuluhan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penyuluhan;

- 5) Membuat kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring;
- 6) Mendorong pencapaian sasaran dengan memanfaatkan anggaran diluar Puslatluh KP melalui kerjasama program pelatihan dan penyuluhan;
- 7) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana standar pelatihan secara bertahap;
- 8) Memberikan informasi pelatihan dan penyuluhan secara cepat, terkini dan akurat kepada *stakeholders*;
- 9) Mendorong tersedianya kurikulum dan media belajar bagi pelatihan teknis dan fungsional;
- 10) Mendorong tersedianya programa penyuluhan, dan materi penyuluhan dalam pendampingan kepada pelaku utama/usaha perikanan;
- 11) Memacu standarisasi pelatih, tenaga pengelola pelatihan, dan Penyuluh Perikanan;
- 12) Memberikan kesempatan bagi setiap pelatih, tenaga pengelola pelatihan, dan Penyuluh Perikanan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan kompetensi jabatan atau kompetensi kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan didukung oleh SDM yang profesional di bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, mesin perikanan dan manajemen. Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga kepelatihan terus dilakukan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik.

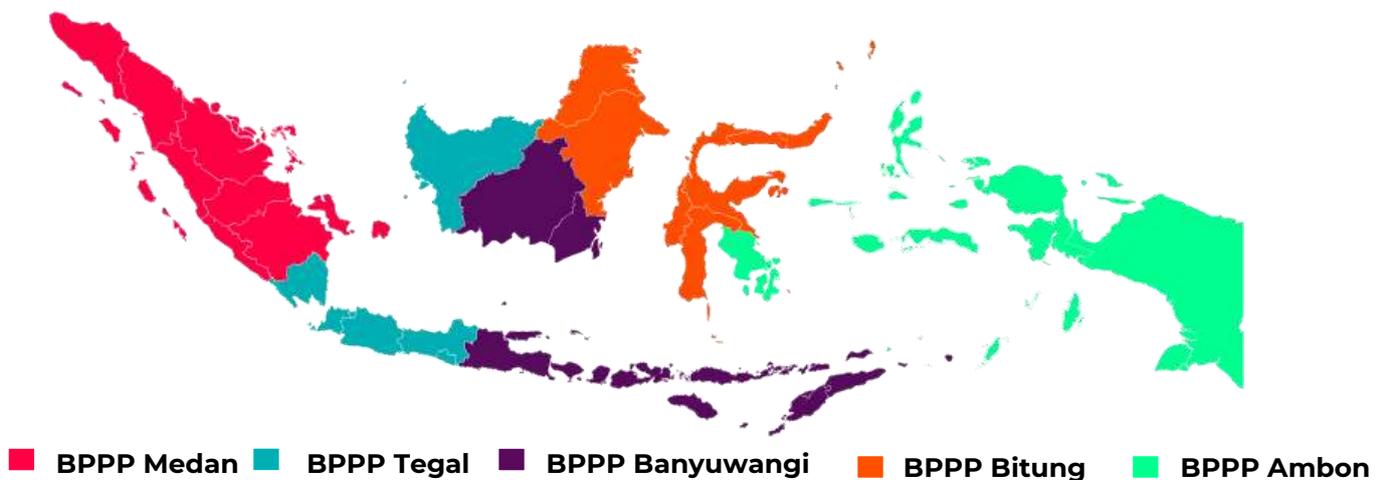
Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu

penyelenggaraan pelatihan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan memiliki wilayah pelatihan yang secara keseluruhan dapat melayani pelatihan di seluruh Indonesia.

**Tabel 1. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP**

No.	Satuan Kerja	Wilayah Pelatihan (Provinsi)	Keterangan
1.	BPPP Medan	Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumsel	9 Provinsi, 127 Kabupaten/Kota
2.	BPPP Tegal	Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng	8 Provinsi, 98 Kabupaten/Kota
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalsel	5 Provinsi, 64 Kabupaten/Kota
4.	BPPP Bitung	Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Kaltim Kalut	7 Provinsi, 79 Kabupaten/Kota
5.	BPPP Ambon	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sultra	5 Provinsi, 57 Kabupaten/Kota
6.	BDA Sukamandi	Seluruh Indonesia	34 Provinsi

## WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN



Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tertentu, Pusat Pelatihan KP

dan UPT Pelatihan dapat mendatangkan Pelatih dari luar instansi guna memberikan mata pelatihan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kondisi aktual di lapangan.

Sedangkan Untuk Keragaan data jumlah Penyuluh Perikanan sebagai pendamping program prioritas KKP Tahun 2024 adalah sebanyak 4.154 orang, terdiri dari: 1). Penyuluh PNS sebanyak 2.367 orang, 2). Penyuluh PPB sebanyak 1.164 orang, dan 3). Penyuluh PPPK sebanyak 623 orang.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluhan memiliki wilayah yang secara keseluruhan dapat di seluruh Indonesia.

**Tabel 2. Satminkal dan Wilayah Kerja Penyuluhan Perikanan Per. Provinsi**

No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)	No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)
1.	BPPP Medan	Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau	6.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang	Bangka Belitung Jambi Bengkulu Sumsel Lampung
2.	BPPP Tegal	Jawa Tengah DI Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Timur	7.	Balai Riset Perikanan Air Tawar Bogor	Banten DKI Jakarta Jawa Barat
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur Kalimantan Selatan	8.	Balai Riset Perikanan Air Payau Maros	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)	No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)
4.	BPPP Bitung	Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo			Sulawesi Barat
5.	BPPP Ambon	Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat	9.	Balai Besar Riset Perikanan Budiaya Perikanan Air Laut Gondol, Bali	Bali NTB NTT Kalimantan Tengah

### PROFIL SATKER LINGKUP PUSLATLUH



### 1.5 Potensi dan Permasalahan

Masalah dan tantangan tentunya dihadapi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam kiprahnya dalam mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan.

Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam khususnya di bidang pelatihan diantaranya:

- A. Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:
- a) Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai Pelatihan dan P2MKP yang masih kurang dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
  - b) Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di P2MKP, mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
  - c) Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP;
  - d) Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
  - e) Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
  - f) Masih rendahnya jumlah masyarakat KP yang kompeten dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP di setiap wilayahnya;

- g) Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;
  - h) Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;
  - i) Standarisasi kompetensi masih terbatas jumlahnya;
  - j) Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;
  - k) Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- B. Aspek Pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan dan penyuluhan perikanan diantaranya:
- a) Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;
  - b) Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;
  - c) Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;
  - d) Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer.
- C. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah; Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasikan.

- D. Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:
- a) Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang memerlukan pembinaan dan pendampingan;
  - b) Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;
  - c) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
  - d) Penyebaran jumlah penyuluh perikanan relatif tidak merata di semua kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan;

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala sampai dengan tahun 2024.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan SDM di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2020-

2024, Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja Tahun 2024, serta metode Pengukuran Kinerja.

- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan
- 5) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.
- 6) **LAMPIRAN**, berisi lampiran PK awal , dan PK Revisi Puslatluh KP Tahun 2024.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Nasional adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Nasional yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa Aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

## 2.2 Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden

Kementrian Kelautan dan Perikanan siap mendukung dan melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

- 1) Membangun sumber daya manusia (SDM);
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- 3) Menghapus kendala regulasi;
- 4) Menyederhanakan birokrasi, dan;
- 5) Melakukan transformasi ekonomi.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan SDM;
- 2) Pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
- 3) Peningkatan pengawasan SDKP;
- 4) Industrialisasi kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan usaha dan investasi;
- 6) Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual; dan
- 7) Komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Kebijakan Pembangunan KKP merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Nasional dalam rangka mencapai sasaran strategi pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024. Dengan demikian Kebijakan Puslatluh KP adalah:

- 1) Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;

- 2) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
- 4) Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi teknologi dan pelatihan.

### **2.3 Tujuan**

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

### **2.4 Sasaran Kegiatan**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Puslatluh KP dalam mendukung target kinerja sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan. Sasaran Program BPPSDM KP yang didukung oleh Puslatluh KP adalah :

1. SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri
2. SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)

3. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan
4. Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan
6. Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BPPSDM.

Sasaran Program (SP-1) "SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri" dengan indikator kinerja sesuai dengan reuiu Renstra Puslatluh KP Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri dari 60% pada tahun 2020 menjadi 72% pada tahun 2024;
- 2) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih target pada Tahun 2024 sebanyak 35.173 orang, dan kumulatif target tahun 2020-2024 sebanyak 121.226 orang;
- 3) Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dari target 3,99 Milyar Rupiah pada Tahun 2022 menjadi 13,42 Milyar Rupiah pada tahun 2024.

Sasaran Program (SP-2) SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) dengan indikator kinerja sesuai dengan reuiu Renstra Pulatluh KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) SDM KP yang bersertifikat kompetensi target pada Tahun 2024 sebanyak 1.450 orang dan secara kumulatif target 2020-2024 sebanyak 4.308 orang;
- 2) Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) dari target pada Tahun 2024 sebanyak 147 orang dan secara kumulatif tahun 2020-2024 sebanyak 478 orang;
- 3) Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) dari target 5 pada tahun 2024 dan kumulatif target tahun 2020-2024 sebanyak 41 paket Kajiwidya;
- 4) Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK) target NSPK pada tahun 2024 sebanyak 8 NSPK, dan untuk target berdasarkan reuiu Renstra 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 27 NSPK.

Sasaran Program (SP-3) Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan dengan indikator kinerja sesuai dengan reuiu Renstra Pulatluh KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh dengan target pada tahun 2020 sebanyak 41.000 kelompok menjadi 47.500 Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP pada tahun 2024;
- 2) Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya dengan target tahun 2024 sebanyak 2.000 kelompok, serta jika dikumulatif berdasarkan target Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 9.015 kelompok;
- 3) Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk target tahun 2024 sebanyak 4.000 kelompok, sementara berdasarkan target Renstra kumulatif tahun 2020-2024 adalah sebanyak 14.500 kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP;

- 4) Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2024 ini ditargetkan sebanyak 12.264 orang, sementara selama periode Renstra 2020-2024 jika dikumulatifkan target tenaga kerja yang terlibat di lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah sebanyak 38.688 orang.

Sasaran Program (SP-4) Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat dengan indikator kinerja sesuai dengan revid Renstra Pulatluh KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas) tahun 2020 sebanyak 5 Desa menjadi 14 Desa pada tahun 2024;
- 2) Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan target tahun 2024 sebanyak 35 kelompok, dan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan 97 kelompok yang mendapatkan percontohan penyuluhan KP.

Sasaran Program (SP-5) Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang ditingkatkan dengan indikator kinerja sesuai dengan revid Renstra Pulatluh KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2024 sebanyak 6 unit serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 39 unit;
- 2) Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2024 sebanyak 5 unit serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 19 unit.

Sasaran Program (SP-6) Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM dengan indikator kinerja sesuai dengan reuiu Renstra Puslatluh KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Aparatur KP yang dilatih dengan target tahun 2024 sebanyak 5.165 orang serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 22.690 unit;
- 2) Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 12 PKS pada tahun 2024, dan berdasarkan target Renstra total tahun 2020-2024 adalah sebanyak 46 PKS;
- 3) Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP target setiap tahun nya adalah 100%;
- 4) Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP sampai dengan tahun 2024 ini sebanyak 6 Satker lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP berpredikat WBK;
- 5) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan target 87 pada tahun 2021 menjadi 94 pada tahun 2024;
- 6) Persentase unit kerja Puslatluh KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target 82 pada tahun 2020 menjadi 94 pada tahun 2024;
- 7) Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP dari 72 pada tahun 2020 menjadi 81 pada tahun 2024;
- 8) Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Puslatluh sebesar  $\leq 1\%$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 0,5\%$  pada tahun 2024;

- 9) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP, sebesar 60% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024;
- 10) Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Puslatluh KP dengan target 1 inovasi setiap tahunnya selama 2022-2024;
- 11) Penilaian Mandiri SAKIP Puslatluh KP dengan target nilai sampai 2024 sebanyak 81.

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2024 diatas, Puslatluh KP menetapkan target IKU untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berbasis Logical framework.

**Logical Framework Analysis (LFA)** adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek.

Target tersebut ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja utama untuk tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*).

Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja Level 2 Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP belum mengalami perubahan, pada bulan Januari 2024

Puslatluh memiliki 9 Sasaran Program dan 17 Indikator Kinerja Utama serta 10 Indikator Kinerja Manajerial.

Tabel.3. Perjanjian Kinerja Puslatluh Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	35.173
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	13,42
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.450
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	147
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widy (paket)	5
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	8
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh (Kelompok)	47.500
		10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	2.000
		11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk(Kelompok)	4.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.264

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)	14
		14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	6
		16	PraSarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	5
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	5.165
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	94
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	94
		23	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	81

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
		24	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	0,5
		25	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	82
		26	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1
		27	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	81

## 2.6 Rencana Kerja Tahun 2024

Adapun kegiatan prioritas Puslatluh KP termasuk UPT Pelatihan KP dan Satminkal Penyuluhan KP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kinerja utama yaitu:

### 1. Pelatihan Masyarakat.

Pelatihan masyarakat akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 35.173 orang, yang difokuskan kepada pelatihan-pelatihan dengan metode *blended/campuran* dan pelatihan klasikal. Pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Diklat, yaitu: BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Aertembaga, dan BPPP Ambon.

### 2. Pelatihan Aparatur.

Pelatihan aparatur bagi 5.165 orang ASN KKP adalah sebagai upaya KKP untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur KP, dilakukan melalui penyelenggaraan diklat struktural, teknis,

fungsional, dan prajabatan yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi dengan metode online/daring/blended menggunakan aplikasi e-milea.

### 3. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang disuluh

Penyuluhan diberikan kepada 47.500 Kelompok pelaku utama/usaha perikanan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan PNS maupun Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), dengan pengendalian kinerja dilaksanakan oleh 9 (Sembilan) Satminkal Penyuluh Perikanan, dengan target kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan kelas kelompok pelaku utama/usaha, dan pembentukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi Sektor KP.

Tabel 4. Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2024

NO.	KEGIATAN	PK JANUARI
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	173.294.839.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan KP	5.500.000.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP	551.389.272.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>730.184.111.000</b>

## 2.7 Pengukuran Kinerja

### A. Rumus Pengukuran Kinerja

Kinerja penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan KP sebagai usaha penciptaan SDMKP yang memiliki kompetensi untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan masih memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut antara lain adalah belum terukurnya kinerja pelatihan dan penyuluhan KP. Penyelenggaraan pelatihan KP tidak jarang penyelenggara pelatihan, baik Puslatluh KP dan UPT Pelatihan, maupun P2MKP merasa kecewa karena dinilai tidak

memiliki kinerja yang standar. Mereka menganggap telah terjadi manipulasi data oleh penilai. Bisa saja itu terjadi kalau penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan dilakukan dengan ukuran subyektif. Dengan kata lain terjadi peluang munculnya bias. Di sini, bias merupakan distorsi pengukuran yang tidak akurat. Meskipun pelatihan bagaimana melakukan penilaian kerja dapat mengurangi bias, maka bias sering terjadi ketika penilaian tetap tidak lepas dari unsur emosional para penilai.

Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

**Logical Framework Analysis (LFA)** adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan

serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Ausguidline, 2005).

Selama ini pemanfaatan **Logical Framework Analysis** masih terbatas bertujuan untuk melakukan proses perencanaan proyek yang bersifat partisipatoris dan berorientasi tujuan. Teknik ini memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam suatu rencana/ program untuk menentukan prioritas dan rencana implementasi. Padahal *LFA* merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (*output*) dan dampak program (*outcome*) akan dimonitor dan dievaluasi dan penyajian ringkasan program dalam suatu format standard.

*LFA* digunakan ketika melakukan identifikasi dan penjajagan dalam penyusunan proposal, menyiapkan disain proyek/ program dalam suatu sistematika dan kaitan yang masuk akal, penilaian disain proyek/ program, memutuskan persetujuan untuk pelaksanaan proyek/ program, monitoring dan evaluasi kemajuan (*progress*) dan kinerja (*performance*) program.

*LFA* juga dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan program, atau tepatnya kemampuan tehnik, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan tehnik dalam menyelenggarakan suatu program. Logical Framework sebagai kemampuan tehnik program karena dapat digunakan sebagai alat untuk Perencanaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat.

Kerangka logika sebagai teknis dalam mengkombinasikan Logika Vertikal maupun Logika Horizontal. Tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan indikator melalui informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam alat verifikasi khusus.

Dalam pelaksanaannya Logframe disusun dalam bentuk Matrix atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar yaitu:

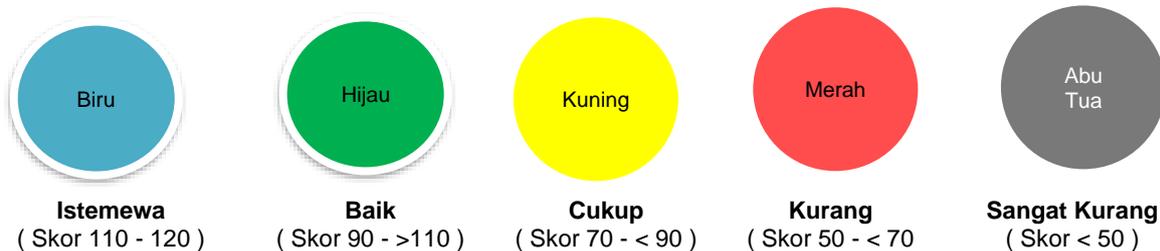
Hubungan antara *Goals*, *Objectives*, *Outputs* dan *Activities* Logika Vertikal dan Logika Horizontal Indikator Asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program *Goals* dalam kerangka logis (*logframe*) adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi diluar control program. *Objectives* atau sasaran program merupakan Rincian/ Bagian dari *Goal*, namun objectives atau sasaran ini selalunya diluar kontrol program. *Goal* dan *Objectives* diluar kontrol program karena kegiatan-kegiatan tidak langsung mempengaruhinya tetapi dapat dicapai dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan program yang lainnya. Sedangkan *Outputs* itu sendiri adalah hasil spesifik apa yang harus diperoleh sesudah program berakhir dan *Activities* adalah Kegiatan-kegiatan apa yang harus disusun untuk memperoleh *outputs*.

Dalam matriks logframe kita juga dapatkan istilah *Objectively Verifiable Indicators* atau disingkat OVI yaitu atau dalam bahasa Indonesia disebut indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan kita untuk bagaimana kita tahu bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan evaluasi dan penggunaannya atau indikatornya dibuat dengan pendekatan *SMART* (*Specific, Measurable, Attainable, Reliability and Timely*).

## B. Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja lingkup Puslatluh dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja berdasarkan Surat Tugas nomor B.31/BPPSDM.5/KP.440/I/2024 tanggal 09 Januari 2024. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 pusat-pusat.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Prestasi Kinerja Puslatluh KP

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada triwulan I tahun 2024 adalah 118,57% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Capaian keberhasilan untuk triwulan I tahun 2024 adalah istimewa, dengan capaiannya dalam beberapa IKU Utama sudah melebihi target yang ditetapkan.

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis Puslatluh KP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Pendekatan Analisis Capaian Kinerja Organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

**Tabel 5. Capaian Kinerja Triwulan 1 tahun 2024 pada Puslatluh KP**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Target TW 1	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72			
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	35.173	13.708	17.708	120 (129,18)
		3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	13,42	1,88	3,88	120 (206,38)
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.450	34	354	120
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	147			
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	5			
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	8			
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7			

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Target TW 1	CAPAIAN	%
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh (Kelompok)	47.500	6.900	8.277	119,96
		10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	2.000	17	25	120 (147,06)
		11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk(Kelompok)	4.000	385	547	120 (142,08)
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.264			
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)*	14			
		14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35			
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya(unit)	6			
		16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya(unit)	5			
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	5.165	670	1.674	120 (249,85)
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12	2	4	120 (200)
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	25	30	120,00
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1			

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Target TW 1	CAPAIAN	%
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	94			
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	94	94	106,94	113,77
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	81			
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	0,5			
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	82	82	82	100,00
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	1			
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	81			

## **Sasaran Program SK.01 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan**

### **Indikator Kinerja IKSK.01.01**

#### **Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri**

---

DUDI adalah singkatan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dunia usaha berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan aspek-aspek dan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia industri berkaitan dengan segala pekerjaan untuk merancang, membuat, menghasilkan suatu produk.

Sampai triwulan I, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP melalui BPPP telah melatih 17.708 orang. Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri perlu dilakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrument evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya. Penyusunan instrument nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pasca pelatihan untuk mengidentifikasi purnawidya yang terserap di dunia usaha/industri yang baru dapat diukur pada triwulan 4.

## **Sasaran Program SK.01 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan**

### **Indikator Kinerja IKSK.01.02**

#### **Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih**

---

IKU terkait Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan kelautan dan perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan (BPPP), yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

IKU Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria yaitu :

- 1) Pelatihan berbasis APBN;
- 2) Peserta merupakan masyarakat (non ASN);
- 3) Penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan model Blended (kombinasi online dan tatap muka).

**Tabel 6. Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih**

Realisasi TW I				2024					Renstra PUSLATLUH 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TWI	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2.632	2.981	3.982	5.667	35.713	13.708	17.708	120	212,48	35.173	50,35

Capaian IKU jumlah masyarakat yang dilatih pada triwulan 1 tahun 2024 sebesar 17.708 orang atau sebesar 120% dari target triwulan 1. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 50,35%. Realisasi Triwulan 1 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 212 % jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Terhadap target Renstra Tahun 2024 capaian Triwulan 1 sebesar 50,35%. Berdasarkan target Jumlah Lulusan Pelatihan masyarakat yang telah dilatih pada masa periode Renstra 2020-2024 sebanyak 121.226 orang, realisasi sampai dengan Triwulan 1 tahun 2024 ini adalah sebanyak 108.479 orang atau mencapai 89,48%.

Adapun sebaran masyarakat KP yang dilatih sebagai berikut ini:

**Tabel 7. Rekap IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih Per satker**

No	Satker	Target TW 1	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	1.780	1.828	102,70
2	BPPP TEGAL	5.000	8.015	120,00
3	BPPP BANYUWANGI	4.000	4.511	112,78
4	BPPP BITUNG	1.528	1.910	120,00
5	BPPP AMBON	1.400	1.444	103,14
	<b>Total</b>	<b>13.708</b>	<b>17.708</b>	<b>120</b>

Adapun faktor **penyebab keberhasilan indikator kinerja Masyarakat KP yang dilatih triwulan 1 Tahun 2024** disebabkan oleh:

- 1) Adanya antusias peserta dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan kp.
- 2) Adanya Kerjasama dengan Dinas, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kp.
- 3) Tersedianya kurikulum/modul pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan Masyarakat.
- 4) Tersedianya sistem pelatihan dengan metode blended, dengan bantuan Penyuluh Perikanan di lapangan.
- 5) Tersedianya Instruktur/Widyaiswara yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pelatihan Masyarakat.
- 6) Balai Pelatihan di lingkup Puslatluh KP telah di approve program diklat awak kapal perikanan oleh Lembaga approval.

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Kerjasama KKP melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan anggota DPR RI khususnya Komisi IV dilaksanakan lebih awal dibanding biasanya, sebagian besar telah dilaksanakan di triwulan 1.

- 2) BLU BPPP Tegal terus melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan pemda, NGO, Perusahaan, lembaga swasta lainnya dalam menjaring peserta pelatihan.
- 3) Melakukan koordinasi perencanaan jadwal pelaksanaan pelatihan dengan Balai Pelatihan.

## Sasaran Program SK.01 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

### Indikator Kinerja IKSK.01.03 Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. PNBP yang dilakukan oleh Puslatluh KP adalah dengan kegiatan Pelatihan, dan Sarana Prasarana Gedung dan Worskhop.

**Tabel 8. Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	0,68	2,37	13,42	1,88	3,88	120	63,71	13,42	28,91

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Triwulan 1 Tahun 2024 sebesar Rp.3.877.383.667,-. Atau 120% dari target Triwulan 1 sebesar Rp1.880.000.000,-. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar Rp13.415.665.000,-. maka realisasi mencapai 28,90%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan 1 pada tahun 2023 sebesar Rp1.380.000.000,- atau adanya kenaikan sebesar 63,71% dari Tahun 2023. Terhadap target Renstra Tahun 2024 capaian Triwulan 1 sebesar 28,91%. Berdasarkan target kumulatif nilai PNBP Satker lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Renstra 2020-2024 sebesar 27,18 Milyar Rupiah, realisasi sampai dengan Triwulan 1 tahun 2024 ini adalah sebanyak 23,31 Milyar Rupiah (85,77%).

**Tabel 9. Rekap IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP**

No	Satker	Target TW 1	Capaian	
1	BPPP MEDAN	60.000.000	87.339.395	120 %
2	BPPP TEGAL	1.580.000.000	2.966.418.368	120 %
3	BPPP BANYUWANGI	100.000.000	541.706.985	120 %
4	BPPP BITUNG	110.000.000	126.798.454	115 %
5	BPPP AMBON	20.000.000	83.778.915	120 %
6	BDA SUKAMANDI	10.000.000	71.341.550	120 %
Total		1.880.000.000	3.877.383.667	120 %

Jika dianalisa lebih lanjut secara umum **penyebab keberhasilan PNBP pada triwulan 1 Tahun 2024** disebabkan oleh:

- 1) Sarana dan Prasarana di Balai Pelatihan dan Penyuluhan dapat di dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan PNBP;
- 2) Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan PNBP.

Kegiatan pendukung capaian Indikator PNBPN lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya kerjasama dengan Perusahaan penangkapan ikan, sekolah sekolah perikanan, lembaga NGO dalam perekrutan peserta pelatihan sehingga ada pemasukan PNBPN;
- 2) Identifikasi sumber sumber PNBPN lainnya di balai dan BLU;
- 3) Penetapan biaya sewa peralatan dan penyewaan Gedung serta optimalisasi workshop pelatihan dengan KPKNL atau instansi lainnya.

## **Sasaran Program SK.02 Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan**

### **Indikator Kinerja IKSK.02.01 SDM KP yang bersertifikat kompetensi**

---

Sebagai upaya pengakuan dan perlindungan atas kompetensi yang dimiliki oleh SDM KP, khususnya tenaga kerja sektor KP, maka Puslatluh KP melalui Balai Diklat pada tahun 2024 telah menetapkan target untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi SDM KP sebanyak 1.450 orang, Indikator kinerja utama untuk Sasaran Strategis ini adalah SDM KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.450 orang, yang dihasilkan oleh 5 (lima) BPPP.

IKU dari sasaran strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah meningkatnya kompetensi SDM KP yang dihasilkan dari proses pelatihan dan penyuluhan KP adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

BPPSDM sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP, sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab atas pencapaian IKU tersebut, dengan indikator

yang hendak dicapai adalah jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberi kewenangan melaksanakan Uji Kompetensi dibawah dan dibentuk oleh BNSP dan lembaga diklat yang merupakan approval untuk melakukan diklat kepelautan internasional dengan mengacu pada standar SKKNI, SK3, dan IMO Course.

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui kegiatan sertifikat kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai tugas/jabatan yang dimiliki sesuai standar kompetensi yang berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sertifikasi kompetensi ni juga memberikan manfaat kepada perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan remunerasi sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki.

**Tabel 10. Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
90	71	0	244	1450	34	354	120	45,08	1.450,00	24,41

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang diuji kompetensinya. Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari SDM KP yang mengikuti sertifikasi kompetensi baik purnawidya pelatihan maupun dari dunia usaha, dan dunia industri.

Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada triwulan 1 tahun 2024 sebesar 354 orang atau sebesar 120% dari target triwulan 1. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 24,41%. Realisasi Triwulan 1 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 45,08 % jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Terhadap target Renstra Tahun 2024 capaian Triwulan 1 sebesar 45,08%. Berdasarkan target SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada periode Renstra 2020-2024 sebanyak 4.308 orang, realisasi sampai dengan Triwulan 1 tahun 2024 ini adalah sebanyak 3.281 orang atau mencapai 76,16 %. Adapun rekapitan sertifikasi kompetensi per Satker sebagaimana tabel berikut. Untuk triwulan 1 ini baru BPPP Tegal dan BPPP Bitung yang memiliki realisasi, sedangkan satker lainnya masih dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi ini.

**Tabel 11. Rekap Sertifikasi Kompetensi per Satker**

No	Satker	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	-		-
2	BPPP TEGAL	33	324	120 %
3	BPPP BANYUWANGI	1	30	120 %
4	BPPP BITUNG	-		-
5	BPPP AMBON	-		-
	<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>354</b>	<b>120 %</b>

Berdasarkan bidang kompetensinya realisasi pada triwulan I ini Budidaya sebanyak 30 orang, Penangkapan 229 orang dan Manajemen sebanyak 41 orang.

**Tabel 12. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi perbidang usaha**

Bidang	BPPP Banyuwangi	BPPP Tegal	Grand Total
Budidaya	30	54	84
Manajemen	-	41	41
Penangkapan	-	229	229
<b>Grand Total</b>	<b>30</b>	<b>324</b>	<b>354</b>

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah:

1. telah adanya approval assesor pelaksanaan uji kompetensi oleh BNSP yang diwakili oleh LSP KP;
2. Permen KKP no.33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, adapun dalam Permen KKP ini untuk Sertifikat Awak Kapal Perikanan wewenang Dirjen Tangkap KKP pada Pasal 127 ayat 2-4 sudah mulai diterapkan;
3. Sistem ujian awak kapal perikanan telah dibuat dan terus disempurnakan bersama DJPT dan Pusdatin;

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja sertifikasi kompetensi pada triwulan 1 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dengan BNSP dalam kegiatan uji sertifikasi, Memperpanjang akreditasi balai pelatihan sebagai tempat TUK;
- 2) Kerjasama dengan Perhubungan laut ataupun DJPT dalam sertifikasi pengawakan kapal perikanan;
- 3) melakukan pendampingan proses approval Program Diklat Awak Kapal Perikanan khususnya di Balai Pelatihan KKP.

## **Sasaran Program SK.03 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan**

### **Indikator Kinerja IKS.03.01 Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)**

---

**Startup** adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Saat ini, istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu

pada bisnis berbasis teknologi. Puslatluh mendefinisikan IKU startup sebagai indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital). Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih.

Puslatluh KP bersama Balai Pelatihan melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait manual Iku dari indicator kinerja Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan). Reviu terhadap hasil capaian IKU tahun 2023 serta sharing dan berbagi pengalaman antar balai. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi terhadap lulusan pelatihan yang berpotensi untuk dijadikan startup berdasarkan profil usahanya dengan bantuan penyuluh perikanan di lapangan.

### **Sasaran Program SK.03 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan**

#### **Indikator Kinerja IKSK.03.02 Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya**

---

Salah satu Penyelenggaraan fungsi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan upaya menjadikan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur sektor kelautan dan perikanan dapat berperan nyata dalam pembangunan nasional. Untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan, salah satu strategi yang ditempuh adalah secara terus menerus meningkatkan profesionalisme para pelatih.

Kebijakan penyelenggaraan pelatihan kp yang ditetapkan adalah diterapkannya kurikulum berdasarkan kompetensi kerja dimana

pelaksanaan proses berlatih dan melatih dengan menggunakan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GGBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu hasil pelatihan yang ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta yang lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah tersedianya pelatih yang profesional, yakni pelatih yang menguasai dan mampu melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk meningkatkan serta mendorong tumbuhnya sikap lebih percaya diri para pelatih dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, maka setiap pelatih di Lembaga Pelatihan perlu melaksanakan kajiwidya sesuai dengan materi yang dilatihkan.

Kajiwidya adalah kegiatan pelatih untuk belajar atau berlatih sendiri, melakukan, mengamati dan menganalisis suatu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja pelatih sesuai dengan substansi mata diklat. Pelatih lembaga pelatihan terdiri dari widyaiswara, instruktur, dan widyaiswara/instruktur luar biasa.

Tahun 2024 terjadi perubahan mekanisme pelaksanaan Kajiwidya, mulai tahun ini akan dilakukan seleksi proposal dan proposal yang dianggap sesuai dan layak yang akan dibiayai untuk dilaksanakan. Puslatluh KP telah Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan kaji widya ini, dan sudah dilakukan sosialisasi kepada BPPP dan instruktur. Saat ini sudah ada proposal yang masuk dan beberapa proposal yang sedang tahap finalisasi. Selanjutnya perlu dibuat tim yang akan melakukan seleksi atas usulan Balai yang masuk, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPPSDMKP untuk diseleksi tahap selanjutnya.

## **Sasaran Program SK.04**

### **Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP**

#### **Indikator Kinerja IKS.04.01**

##### **Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)**

---

Ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten perlu diimbangi dengan tersedianya regulasi yang baik, sehingga dapat menjadi standar advokasi dalam mencermati kendala dan permasalahan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan bahan yang komprehensif serta input yang terintegrasi melalui pentahapan proses pembahasan dan penyelesaiannya khususnya dalam memberikan dasar yang kuat untuk melakukan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan terhadap pengurangan pengentasan kemiskinan.

Regulasi/Panduan/Pedoman/NSPK dan Administrasi terkait standarisasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan yang akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian. Selain itu Sertifikasi kompetensi kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun Regulasi/Panduan/Pedoman/NSPK dan Administrasi terkait Sertifikasi kompetensi atau tenaga kerja yang telah atau tenaga kerja yang berpengalaman. Selain itu aturan dan pedoman untuk penyusunan Modul dan kurikulum pelatihan aparatur dan pelatihan Masyarakat KP.

Selain itu, Regulasi/Pedoman/Panduan/ NSPK dan Administrasi terkait Penataan Sarana dan Prasarana penyuluhan KP serta Kelembagaan Penyuluhan khususnya pasca proses peralihan kewenangan Penyuluhan KP sebagai dampak UU Nomor 23 tahun 2014, selain itu sebagai komitmen KKP dalam memberikan petunjuk berupa derivasi peraturan Pasca terbitnya Permen PAN 18 Tahun 2022 dan PermenPAN 19 Tahun 2022 tentang Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan, dan jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan. Aturan terkait Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan juga akan disusun sebagai aturan mengatur kelompok pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Telah dilakukan rapat-rapat penyusunan draft atas peraturan yang akan dihasilkan pada tahun ini. Rapat penyusunan dilakukan internal di lingkup Puslatluh KP ataupun melibatkan stakeholder lain untuk mendapatkan masukan atas draft yang disusun.

## **Sasaran Program SK.04 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP**

### **Indikator Kinerja IKSK.04.02 Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)**

---

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang terstandar di bawah BPPSDM yang masih berlangsung. Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan.

Lembaga pelatihan yang terstandar merupakan langkah strategis dalam rangka menjamin mutu dan meningkatkan layanan pelatihan dan penyuluhan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan standardisasi seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, meliputi standardisasi: program, lulusan, evaluasi, biaya, proses, ketenagaan, serta standardisasi sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP.

Dengan sistem manajemen mutu (QMS) yang efektif ini, maka Balai memiliki akan struktur yang lebih jelas, pendekatan sistematis untuk meningkatkan layanan kepada setiap peserta latih, serta membantu untuk pengendalian dan proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan akreditasi QMS ini juga akan memberikan manfaat kepada Balai untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelatihan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi tingkat kesalahan yang mengarah pada peningkatan produktivitas Balai.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan KP sejak tahun 2017 telah terakreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Dimana terdapat 7 karakteristik utama yaitu; pendekatan pro aktif, integrasi mutu ke dalam proses bisnis, performance, mengikuti siklus PDCA, penyesuaian lingkup dengan komitmen organisasi, bersifat sukarela, dan relevan dengan tugas dan fungsi Balai. Dengan akreditasi ini telah memberikan manfaat nyata kepada balai dalam peningkatan kepuasan layanan kepada peserta latih, seperti pembuatan Pelayanan Pelatihan Terpadu satu Pintu (PTSP) di beberapa balai, pengurangan biaya pelatihan tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan pelatihan dan mutu lulusan pelatihan, serta mampu mengurangi permasalahan atau sengketa antara bagian dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi.

Telah dilakukan awareness kepada tim yang ada di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP serta UPT Lingkup Puslatluh KP dalam rangka peningkatan pemahaman terkait sistem manajemen mutu (QMS). Telah dilakukan juga audit internal dimasing-masing satker sebagai Langkah awal proses audit ISO oleh pihak ketiga nantinya. Setiap Satker menyiapkan dokumen dokumen kelengkapan sebagai bentuk bukti telah dilakukan system manajemen mutu di balai.

## **Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

### **Indikator Kinerja IKSK.05.02 Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh**

---

IKU jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya merupakan IKU yang menunjukkan jumlah

anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 47.500 orang, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya. Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 13. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
11.399	19.207	14.329	8.855	47.500	6.900	8.277	119,96	- 6,53	47500	17,43

Data Capaian IKU Kelompok yang disuluh setiap tahunnya dapat berulang atau merupakan kelompok yang sama. Penyuluh melaporkan update kondisi kelompok binaannya apakah masih aktif atau tidak, dan bagaimana kondisi usaha dan kelas kelompoknya, laporan tersebut tertuang dalam profil kelompok yang diupdate oleh Penyuluh Perikanan.

IKU kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 47.500 orang berbeda dengan tahun 2023 yang sebesar 47.000 kelompok. Berdasarkan target Triwulan I pada Tahun 2024 ini realisasi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh mencapai 8.277 kelompok (119,96%). Jika dibandingkan dengan target tahunan, baru mencapai 17,43% kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh. Dibandingkan capaian Tahun 2023 sebesar 8.855 kelompok terjadi penurunan 6,53%.

**Tabel 14. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh**

No	Saminkal	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	400	480	120,00
2	BPPP TEGAL	150	155	103,33
3	BPPP BANYUWANGI	2.200	2.549	115,86
4	BPPP BITUNG	350	420	120,00
5	BPPP AMBON	400	600	120,00
6	BRPPUPP Palembang	900	1.110	120,00
7	BRPBATPP Bogor	500	500	100,00
8	BBRBLPP Gondol	500	550	110,00
9	BRPBAPPP Maros	1.500	1.913	120,00
<b>Total</b>		<b>6.900</b>	<b>8.277</b>	<b>119,96</b>

Berdasarkan rekap capaian IKU Kelompok Pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh perbidang usaha, kelompok yang paling banyak di triwulan 1 ini adalah kelompok budidaya sebanyak 4.279 kelompok. Selanjutnya kelompok penangkapan sebanyak 2.973 kelompok. Kelompok

Pengolahan dan pemasaran sebanyak 919 kelompok. Sementara kelompok garam hanya 80 kelompok dan kelompok konservasi sebanyak 26 kelompok.

**Tabel 15. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh Perbidang usaha**

No.	SATKER	BUDIDAYA	GARAM	PENANGKAPAN	Pengawasan/ Konservasi	PENGOLAHAN/ PEMASARAN	Total
1	BBRBLPP Gondol	199	6	283	1	61	550
2	BPPP Ambon	128		399	3	69	599
3	BPPP Banyuwangi	1.401	53	730	16	350	2.550
4	BPPP Bitung	165		228	1	26	420
5	BPPP Medan	246	14	189		31	480
6	BPPP Tegal	90	1	45		19	155
7	BRPBAPPP Maros	982	3	757	1	170	1.913
8	BRPBATPP Bogor	357	3	81	2	57	500
9	BRPPUPP Palembang	711		261	2	136	1.110
	<b>Grand Total</b>	<b>4.279</b>	<b>80</b>	<b>2.973</b>	<b>26</b>	<b>919</b>	<b>8.277</b>

Penyebab keberhasilan IKU ini pada capaian Triwulan 1 tahun 2024 adalah:

- 1) Adanya SKP bagi setiap Penyuluh sehingga wajib menyuluh ke kelompok binaannya
- 2) Adanya Sanksi bagi Penyuluh yang tidak tercapaian nilai SKP nya
- 3) Pelaksanaan Penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program-program prioritas KKP lainnya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah tersedianya database penyelenggaraan penyuluhan melalui SIMLUH KP

dari aplikasi sistem pelaporan online penyuluh perikanan yang dilaporkan oleh penyuluh dalam melaporkan capaian kinerja dalam pendampingan kelompok. Adapun **upaya upaya** Puslatluh yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: membuat aplikasi SIMLATLUH KP untuk mempermudah dalam input data capaian dan pemantauan kinerja penyuluh, melakukan revisi PermenKP nomor 14 tahun 2012, melakukan video conference setiap minggu dengan para penyuluh perikanan.

#### **Indikator Kinerja IKSK.05.01**

#### **Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)**

---

IKU kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sasaran Strategis dari IKU ini adalah meningkatnya nilai ekonomi KP mendukung terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan fokus pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dimana Puslatluh KP memiliki peran strategis dalam peningkatan nilai ekonomi KP melalui peningkatan kelas kelompok utama/pelaku usaha perikanan.

Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan melalui pendekatan kelompok sehingga kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu tumbuh dan berkembang lebih

baik. Orientasi dari proses tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan kelas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: (1). Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350. (2). Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650. (3). Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000.

**Tabel 16. Capaian IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	4	2	0	2.000	17	25	120	-	2.000	1,25

IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2.000 kelompok, capaian Triwulan 1 Tahun 2024 sebesar 25 kelompok atau 120% dari target triwulan 1 sebanyak 17 kelompok, sementara jika dibandingkan dengan target tahunan realisasi baru mencapai 1,25%. Perbandingan dari triwulan 1 tahun 2023 sebelumnya, pada tahun lalu di triwulan I masih belum ada

realisasi kelompok yang meningkat kelasnya. Jika dibandingkan capaian Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Tahun 2023 ada peningkatan hal ini disebabkan IKU ini termasuk IKU yang dipantau dalam kegiatan Prioritas KKP dan masuk dalam IKU Level 1. Target Renstra kumulatif 2020-2024 IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok) secara kumulatif ditargetkan sebanyak 9.105 kelompok, dan sampai triwulan I tahun 2024 baru terealisasi 7.573 kelompok atau 84%.

**Tabel 17. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok) per Satminkal**

No	Saminkal	Target	Capaian	%
1	BPPP Medan	0	0	-
2	BPPP Tegal	0	0	-
3	BPPP Banyuwangi	2	7	120
4	BPPP Bitung	0	0	-
5	BPPP Ambon	2	2	100
6	BRPPUPP Palembang	5	6	120
7	BRPBATPP Bogor	7	7	100
8	BBRBLPP Gondol	0	0	-
9	BRPBAPPP Maros	1	3	120
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>25</b>	<b>120</b>

**Tabel 18. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok) per bidang usaha**

NO.	SATKER	Budidaya	Penangkapan	Pengolahan /Pemasaran	Total
1	BPPP Ambon		1	1	2
2	BPPP Banyuwangi	4	3		7
3	BRPBAPPP Maros		1	2	3
4	BRPBATPP Bogor	6		1	7
5	BRPPUPP Palembang	4		2	6
<b>Grand Total</b>		<b>14</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>25</b>

### **Penyebab Keberhasilan IKU ini dikarenakan:**

1. Pendampingan secara terus menerus oleh Penyuluh Perikanan kepada kelompok yang meningkatkan antusiasme kelompok untuk meningkatkan kemampuan kelas kelompoknya;
2. Penyuluh Perikanan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi peningkatan kelas kelompok bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun **Upaya Upaya** yang dilakukan adalah

1. Penyuluh melakukan identifikasi kelompok yang berpotensi naik kelas berdasarkan penilaian kelas kelompok tahun sebelumnya.
2. Penetapan target kinerja Penyuluh yang merupakan cascading dari kepala Satminkal sudah dilakukan diawal tahun, sehingga Penyuluh sudah langsung aktif mengejar target target kinerjanya.
3. Puslatluh KP dan Satminkal melakukan sosialisasi kepada Penyuluh Perikanan terhadap target kinerja IKU Kenaikan Kelas Kelompok dan strategi pencapaian target tersebut;
4. Melakukan percepatan proses penilaian kelas kelompok mulai dari SK Tim penilai oleh Kepala Dinas, Proses Penilaian ke Kelompok, Rapat Penilaian, Sampai Sertifikat Kelompok diterbitkan oleh Camat;
5. Penyuluh melakukan pendekatan kepada pejabat berwenang untuk mempermudah proses administrasi peningkatan kelas kelompok dan pendampingan terus menerus dalam proses kenaikan kelas.

### **Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

#### **Indikator Kinerja IKSK.05.03 kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha KP yang dibentuk (Kelompok)**

IKU terkait Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan

dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Sasaran Strategis dari IKU ini adalah mempersiapkan calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan.

IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk diukur dengan menghitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk / ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan di periode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

**Tabel 19. Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha KP yang Dibentuk**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
934	956	662	671	4.000	385	547	120	-18,48	4.000	13,68

Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk pada triwulan I mencapai 547 Kelompok atau 120% dari target triwulan I sebanyak 385 kelompok. Capaian iku Triwulan I jika dibandingkan dengan target tahunan adalah 13,68%. Capaian triwulan I ini jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 18,48%. Perbandingan dengan target Renstra target kumulatif tahun 2020-2024

sebanyak 14.500 kelompok, sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah mencapai 15.501 atau 106,9%.

Pembentukan kelompok ditandai dengan Berita Acara pembentukan/penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah atau kepala desa) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota. penurunan output sebesar 18,48% hal ini disebabkan adanya semakin berkurangnya pelaku usaha menjadi kelompok dan proses yang masih sulit untuk menjadi kelompok baru. Sebagian penyuluh kesulitan menemukan Kumpulan pelaku utama yang masih belum berkelompok, walaupun ada biasanya karena mereka lebih nyaman untuk bekerja sendiri sendiri tidak terwadah dalam satu kelompok saja. Hal ini terutama kebanyakan terjadi di perkotaan. Selain itu Proses penetapan SK Pembentukan Kelompok biasanya baru ada pada triwulan II dan adanya Faktor eksternal sangat berpengaruh karena yang mengesahkan SK Pembentukan dari Pemerintah daerah.

Sebaran kelompok yang dibentuk berdasarkan Satminkal, sebagai berikut:

**Tabel 20. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang dibentuk (Kelompok)**

No	Saminkal	Target	Capaian	%
1	BPPP MEDAN	50	60	120
2	BPPP TEGAL	10	17	120
3	BPPP BANYUWANGI	40	70	120
4	BPPP BITUNG	10	15	120
5	BPPP AMBON	5	10	120
6	BRPPUPP Palembang	70	131	120
7	BRPBATPP Bogor	70	70	100
8	BBRBLPP Gondol	30	30	100
9	BRPBAPPP Maros	100	144	120
	<b>Total</b>	<b>385</b>	<b>547</b>	<b>120</b>

**Tabel 21. Rekap IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha yang dibentuk (Kelompok)**

No.	Satker	BUDIDAYA	Garam	PENANGKAPAN	PENGOLAHAN/ PEMASARAN	Pokmaswas/ Konservasi	Total
1	BBRBLPP Gondol	8		12	9	1	30
2	BPPP Ambon	4		2	4		10
3	BPPP Banyuwangi	53	1	7	8	1	70
4	BPPP Bitung	6		5	4		15
5	BPPP Medan	18		36	6		60
6	BPPP Tegal	4		10	3		17
7	BRPBAPPP Maros	75		50	19		144
8	BRPBATPP Bogor	50		9	11		70
9	BRPPUPP Palembang	62		42	26	1	131
	<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>1</b>	<b>173</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>547</b>

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan:

1. Adanya persyaratan dalam pemberian bantuan pemerintah baik dari eselon I teknis KKP maupun dari Pemda yang mensyaratkan bahwa penerima bantuan harus dalam bentuk kelompok;
2. Pendampingan oleh penyuluh meningkatkan kesadaran pelaku utama akan pentingnya berkelompok.

Adapun **upaya upaya** yang dilakukan Puslatluh kp adalah

1. Puslatluh KP dan Satminkal melakukan sosialisasi kepada Penyuluh Perikanan terhadap target kinerja IKU Penumbuhan Kelompok dan strategi pencapaian target tersebut;
2. Melakukan sosialisasi permen kp nomor 14 tahun 2012 kepada penyuluh perikanan, dinas kp dan pelaku usaha dengan melalui Vidio conference, media sosial serta eselon 1 lingkup KKP.

## **Sasaran Program SK.05** **Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

### **Indikator Kinerja IKSK.05.04** **Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP**

---

IKU Tenaga Kerja yang terlibat lingkup Puslatluh KP adalah Tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP, adapun capaian pada IKU ini sesuai manual IKU nya diambil dari data Jumlah PPB, Jumlah Pengelola UMKM, dan Jumlah P2MKP dengan target tahun 2024 sebanyak 12.164 orang. Pengukuran IKU ini dilakukan secara Tahunan. Adapun progres capaian sampai triwulan I ini telah ditetapkan SK penyuluh perikanan bantu sebanyak 1.356 orang melalui SK Kepala BPPSDM KP nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyuluh Perikanan Bantu. Saat ini juga sedang disiapkan Keputusan Kepala badan tentang P2MKP. Penyuluh Perikanan masih melakukan identifikasi awal untuk UMKM di sektor Kelautan dan Perikanan yang dapat dijadikan sebagai capaian IKU ini.

## **Sasaran Program SK.06** **Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP**

### **Indikator Kinerja IKSK.06.01** **Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)**

---

Penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Faktanya sampai saat ini khususnya kegiatan hilirisasi teknologi kepada pengguna masih belum optimal. Untuk itu, dibutuhkan kegiatan hilirisasi Iptek untuk mengubah perilaku serta pemanfaatan inovasi teknologi oleh masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk. Ditambah lagi hasil

riset yang dihasilkan harus bisa disampaikan dan diterapkan oleh masyarakat. Beberapa jenis kegiatan riset yang dilakukan, mulai dari kegiatan yang bersifat responsif, antisipatif, hingga yang bersifat rekomendasi. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan hasil riset perlu suatu kegiatan diseminasi yang dapat secara luas berpengaruh terhadap usaha-usaha peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja BPPSDMKP memberikan solusi untuk menerobos tantangan tersebut dengan mengkolaborasikan kegiatan riset dan SDM melalui program Desa Inovasi. Program ini mendorong pemangku kepentingan desa untuk membangun budaya inovasi berbasis kelautan dan perikanan dalam mengelola sumberdaya untuk kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi bersandar sebatas eksploitasi sumberdaya, tapi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya berbasis iptek. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan program, hasil karya para peneliti BPPSDMKP akan diramu oleh instruktur, widyaiswara, penyuluh, dosen, dan stakeholder terkait agar dapat mudah diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat. Di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan hilirasi paket teknologi dalam rangka mengintroduksi paket teknologi kelautan dan perikanan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Desa Inovasi dilakukan secara partisipatif antar Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP, eselon I lingkup KKP, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat dengan harapan teknologi-teknologi hasil riset BPPSDMKP tepat guna sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta petambak garam.

Pusat Pelatihan dan penyuluhan KP mendapatkan target IKU Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan lptek KP pada tahun 2024 sebanyak 14 desa, pada triwulan I ini baru dilakukan identifikasi terhadap calon lokasi desa mitra yang baru untuk selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPPSDM.

Sementara itu untuk Desa Mitra yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya terus dilakukan koordinasi oleh penyuluh perikanan dengan pemerintah daerah serta aparat desa setempat untuk optimalisasi kegiatan sektor kelautan dan perikanan yang ada di lokasi.

## **Sasaran Program SK.06 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP**

### **Indikator Kinerja IKSK.06.02 Kelompok Pelaku utama dan Pelaku usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)**

---

IKU ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan dan perikanan tepat guna. Penghitungan dilakukan mengidentifikasi jumlah percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Satker UPT telah berkoordinasi dengan pusat terkait unit-unit percontohan yang akan dilakukan pengembangan sebagai bagian dari capaian output ini nantinya. Koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya pencapaian target indikator kinerja serta pemahaman bersama terkait manual iku sehingga nantinya ada persamaan persepsi dalam pencapaian dan pelaporan kinerjanya.

## **Sasaran Program SK.07 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

### **Indikator Kinerja IKSK.07.01 Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya(unit)**

---

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif.

Beberapa proses pengadaan yang dilakukan Balai sudah dalam proses perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan pihak ketiga untuk pengadaan langsung maupun penandatanganan kontrak. BPPP Medan telah selesai pengadaan kendaraan operasional roda 4; BPPP Tegal, BPPP Bitung dan BPPP Ambon telah selesai pengadaan sarana pelatihan tinggal proses administrasi BAST nya masih dalam proses.

### **Sasaran Program SK.07**

### **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

#### **Indikator Kinerja IKSK.07.02**

#### **Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya(unit)**

---

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif.

Untuk Capaian Prasarana ini di BPPP Tegal sudah menyusun dokumen melalui jasa konsultan perencanaan konstruksi untuk pembangunan fisik Laboratorium Maritime English; BPPP Banyuwangi telah selesai menyusun

dokumen melalui jasa konsultan perencanaan konstruksi untuk pekerjaan fisik renovasi asrama; BPPP Ambon on progress pekerjaan fisik renovasi kantor induk dan workshop budidaya.

### Indikator Kinerja IKSK.08.01 Aparatur KP yang dilatih (orang)

IKU untuk Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi, maupun oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan memiliki peran strategis dalam pencapaian IKU tersebut.

**Tabel 22. Capaian IKU Aparatur yang dilatih**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022- 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
465	463	284	2.415	5.165	670	1.674	120	- 30,68	5.165	32,41

Target kinerja triwulan I tahun 2024 ini sebanyak 670 orang, dan realisasi mencapai lebih dari 120% yaitu 1.674 orang. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024, realisasi baru mencapai 32,41%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan 1 tahun 2023 sebanyak 2.415 orang atau 50,62% dari target tahunan sebanyak 4.770 orang, maka terjadi penurunan sebanyak 30,68%. Animo Diklat Dasar menurun karena adanya peraturan untuk pengangkatan dan penjenjangan cukup dengan Penilaian

Kompetensi/ Uji kompetensi. Saat ini Puslatluh KP bersama BDA Sukamandi akan berkoordinasi dengan Biro SDM AO terkait hal tersebut.

Apabila melihat target Renstra 2020-2024 kumulatif sebesar 22.690 orang, sampai triwulan I tahun 2024 ini sudah tercapai sebanyak 26.582 orang atau 117,15%.

**Tabel 23. Rekap IKU Aparatur KP yang dilatih (orang)**

No.	KEGIATAN	Target	Capaian	%
1	Aparatur KP yang dilatih dengan metode Blended (orang)	100	114	114
2	Aparatur KP yang dilatih dengan metode Full online (orang)	570	1.560	120
<b>Total</b>		<b>670</b>	<b>1.674</b>	<b>120</b>

Capaian positif IKU ini antara lain disebabkan oleh:

1. Pelatihan melalui aplikasi aplikasi e-milea sehingga bisa online ke semua ASN KKP
2. Eselon I Teknis pada awal tahun sudah berkoordinasi dengan BDA Sukamandi mengenai Diklat Teknis yang akan dilaksanakan
3. Tersedianya sarana pokok dan penunjang penyelenggaraan diklat,
4. Widyaiswara yang telah memiliki sertifikat ToT sesuai bidang diklat yang dilatihkan, dan tersedianya perangkat kurikulum dan modul pelatihan, serta telah terakreditasinya program diklat kepemimpinan tingkat III dan IV, serta diklat prajabatan di BDA Sukamandi oleh LAN-RI.

**Upaya Upaya** yang dilakukan dalam Peningkatan kompetensi ASN KP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada tahun 2024 ini ditargetkan sebanyak 5.165 Pegawai ASN KP mengikuti pelatihan, baik pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan maupun pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, seperti Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis/manajerial dengan melakukan kerjasama dan sinkronisasi

dengan Eselon 1 KKP dalam Identifikasi kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan.

## Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

### Indikator Kinerja IKSK.09.01

#### Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)

---

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah jejaring dan atau kerjasama yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan maupun UPT Pelatihan dan Penyuluhan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati terkait kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati dalam bentuk Kepmen, SK, MOU, dan atau KAK yang sudah ditandatangani.

IKU dari sasaran strategis terselenggaranya kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan ini menggambarkan inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Puslatluh KP yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan, dan sebagai upaya lanjutan dari output yang telah dihasilkan untuk menjadi *input* pada proses selanjutnya.

**Tabel 24. Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
1	6	4	2	12	2	4	120	100,00	12	33,33

Pada triwulan 1 tahun 2024 ini capaian untuk jumlah jejaring dan/atau kerjasama Puslatluh KP sudah ada capaian 4 PKS, disbanding target triwulan I yang ditargetkan 2 PKS maka realisasi melebihi 120%. Sedangkan dibandingkan target tahunan sebanyak 12 PKS (33,33%). Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan 1 tahun 2023 yang tercapai sebanyak 2 kerjasama sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2023 adanya kenaikan sebesar 100%.

Capaian keberhasilan IKU ini antara lain disebabkan oleh:

1. Kerjasama dengan Intansi terkait lainnya, Pemerintah daerah dan NGO pada awal tahun ;
2. Pemenuhan SDM Tenaga Pelatih;
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelatihan.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi intens dengan pihak terkait yang berpotensi untuk dilakukan Kerjasama dalam upaya peningkatan peran pelatihan dan penyuluhan KP serta memperluass jangkauan pelayanan kepada Masyarakat. Selain itu juga terus dilakukan koordinasi untuk tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani PKS nya, seperti dengan BNSP, Kementranker, Perlaut, LSP KP, JICA.

## **Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

### **Indikator Kinerja IKSK.09.02 Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)**

---

Indikator Kinerja ini merupakan Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal,

layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Formula indikator kinerja ini A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di tandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. Presentase dokumen layanan manajemen yang tersedia/ dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan.

**Tabel 25. Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
62	34,78	18,37	27,38	100	25	30	120	9,57	100	30,00

Pada tahun 2024 triwulan 1 ini capaiannya sebesar 30% atau lebih dari 120% target Triwulan 1 yang ditargetkan 25%. Dibandingkan dengan tahun 2023 pada triwulan yang sama terjadi kenaikan 9,57% yaitu tercapai sebesar 27,96%. Bukti capaian IKU ini diperoleh dari Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker.

Faktor Keberhasilan kegiatan ini yaitu:

- 1) Adanya koordinasi dengan tim kerja dalam penyiapan data dukung IKU-  
IKU yang dilakukan secara kontinu setiap bulannya;
- 2) Telah disusun laporan-laporan seperti laporan keuangan, BMN,  
kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan kinerja;

Upaya Upaya yang dilakukan pada IKU ini adalah:

- 1) Melakukan pemantauan secara rutin setiap bulannya dan  
mengumpulkan data dukung untuk dokumen Realisasi  
Anggaran, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Dokumen  
Perencanaan dan Laporan Mingguan;

### **Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

#### **Indikator Kinerja IKSK.09.03 Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)**

---

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian

sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Tahun 2024 ini yang ditarget untuk lolos WBK sebanyak 1 (satu) Satker, yaitu Satker BPPP Bitung. BPPP Bitung sudah dilakukan pendampingan dari tahun sebelumnya, di triwulan I ini sudah dilakukan pendampingan baik dari Sekretariat BPPSDMKP didampingi tim dari Pusat Pelatihan dan penyuluhan KP untuk penguatan pada area area yang dinilai masih kurang untuk peningkatan nilai, sehingga BPPP Bitung nantinya dapat ditetapkan sebagai Satker WBK lingkup KKP.

## **Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

### **Indikator Kinerja IKSK.09.04 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP**

---

IKU ini Nilai rekonsiliasi kinerja Puslatluh KP merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IKU Ini belum ada capaiannya karena menggunakan metode pengukuran tahunan. Progres yang telah dilakukan adalah penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti Perjanjian Kinerja, Matrik Rencana Aksi, Manual IKU, Matrik Cascading IKU, pengukuran kinerja melalui aplikasi Kinerjaku dilengkapi dengan data dukung capaiannya, serta penyusunan laporan kinerja triwulanan.

## Sasaran Program SK.09

### Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

#### Indikator Kinerja IKSK.09.05

#### Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Sistem penghitungan dengan menggunakan Aplikasi (*collaboration office*) dengan alamat portal.kkp.go.id; Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I – IV.

**Tabel 26. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
62	100	100	100,00	94	94	106,94	113,77	6,94	94	113,77

Capaian Puslatluh KP pada triwulan I ini adalah 106,94 atau 113,77% dari target 94. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu di triwulan yang sama, maka capaian terjadi kenaikan sebesar 6,94%. Hal ini disebabkan adanya perbedaan aplikasi yang dipergunakan oleh user yang sebelumnya menggunakan aplikasi Bitrix24.kkp menjadi aplikasi coofis.kkp sehingga ada perbedaan perhitungan capaiannya.

Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pejabat di lingkungan Puslatluh KP sudah secara rutin menggunakan aplikasi collaboration office dan melaporkan kegiatannya;
2. *Input* data ke dalam aplikasi CofisKKP sudah memuat unsur 5W1H.

Upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian IKU ini adalah : Melaksanakan bimtek aplikasi CofisKKP oleh tim Dukungan Manajemen secara rutin dan adanya *helsdesk* penginputan berita sehingga mempermudah dalam input berita.

## **Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

### **Indikator Kinerja IKSK.09.06 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)**

---

IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP terdiri dari indeks kualifikasi Pendidikan ASN, indeks kompetensi ASN, indeks kinerja ASN, dan indeks disiplin ASN KKP.

IKU Ini belum ada capaiannya karena menggunakan metode pengukuran tahunan. Pegawai Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sudah mulai mengikuti bimtek ataupun pelatihan baik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, ataupun mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh BDA Sukamandi ataupun penyelenggara lainnya. Selain Bimtek dan Diklat, pegawai juga mengikuti seminar/workshop yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait dan Pembina jabatan fungsionalnya masing-masing.

## Sasaran Program SK.09

### Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

#### Indikator Kinerja IKSK.09.07

**Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)**

---

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari pada itu, penting untuk menjaga pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen. IKU ini belum ada capaiannya karena menggunakan metode pengukuran tahunan. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP melalui jajarannya, terus berkoordinasi dengan Satker lingkup Puslatluh KP dan Sekretariat BPPSDMKP setiap kali ada audit oleh BPK, selain melakukan pendampingan ke satuan kerja, juga memastikan setiap dokumen dokumen yang diminta oleh BPK untuk dipenuhi segera dan selanjutnya menindaklanjuti setiap temuan/catatan yang diberikan oleh BPK.

## Sasaran Program SK.09

### Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

#### Indikator Kinerja IKSK.09.08

#### Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen.

**Tabel 27. Capaian Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)**

Realisasi TW I				2024					Renstra Puslatluh 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
96,43	95,12	100	75,00	82	82	82	100	9,33	82	100,00

Pada tahun 2024 triwulan I dari target IKU sebesar 82% capaiannya sebesar 82%, atau tercapai 100% dari target.

Faktor Keberhasilan IKU ini adalah :

1. adanya komitmen manajemen Puslatluh dalam mengelola adminstrasi keuangan secara *good government* dengan pembukuan laporan keuangan yang rapih.
2. Pimpinan berkomitmen untuk segera menyelesaikan setiap catatan ataupun temuan ketidaksesuai dari Itjen.

Upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian IKU ini adalah : Adanya tertib administrasi pembukuan laporan keuangan, serta melakukan koordinasi antara pimpinan dengan tim dibawahnya untuk menyelesaikan segera setiap temuan yang ada.

## **Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

### **Indikator Kinerja IKSK.09.9 Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)**

---

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-

assessment). PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah d.h.i KKP dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup BPPSDMKP Tahun 2023 tersebut bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB Tahun 2023 lingkup BPPSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BPPSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 26 Tahun 2020, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB KKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup KKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker terkait, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB. Dalam rangka PMPRB tersebut, Inspektorat Jenderal KKP perlu menilai kesesuaian pemenuhan dokumen dengan matriks penilaian mandiri (*self assessment*).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup KKP Tahun 2023 bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB TA 2023 lingkup BPPSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BPPSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 30 Tahun 2018, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB BPPSDMKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDMKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker lingkup BPPSDMKP, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB.

IKU Ini belum ada capaiannya karena menggunakan metode pengukuran tahunan dengan target 1 satker. Tahun 2024 target inovasi adalah sebanyak 1 inovasi. Sudah ditetapkan yang akan membuat usulan inovasi adalah BPPP Medan. Sampai dengan Triwulan I telah dilakukan pendampingan dengan BPPP Medan untuk usulan inovasi yang akan disampaikan ke Sekretariat BPPSDMKP, serta dengan penguatan substansi inovasi apa yang akan diusulkan tersebut.

## **Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**

### **Indikator Kinerja IKSK.09.10 Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)**

---

IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023, dan pengukuran capainya menggunakan Tahunan.

Sebagaimana kita ketahui Bersama, berdasarkan Peraturan Menteri KP No. 68 Tahun 2017 tentang SAKIP (saat ini Permen KP dimaksud dalam proses review), tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan disertai alat bukti. SAKIP membantu kita untuk memberikan pedoman proses/tahapan pencapaian tujuan organisasi yang valid, measurement, dan akuntable, serta memberikan informasi kepada kita posisi pencapaian kinerja yang telah dihasilkan. (apakah berhasil ataukah gagal).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, salah satu pengendalian dan fasilitasi dalam pengelolaan kinerja dalam adalah dalam bentuk Advisory Services (pendampingan dalam rangka perbaikan kinerja). Salah satu bentuk implemementasi di BPPSDM berupa inisiasi metode pendampingan evaluasi SAKIP mandiri dan rekon kinerja pada seluruh satker secara berjenjang yang dilakukan BPPSDM, mulai diadopsi untuk lingkup KKP. Begitupula evaluasi berbasis aplikasi menjadi nilai inovasi bagi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP, menjadikan BPPSDM mendapatkan nilai lebih dalam pengelolaan kinerja.

IKU Ini belum ada capaiannya karena menggunakan metode pengukuran tahunan. Samapi dengan triwulan I telah disusun dokumen dokumen kelengkapan untuk pemenuhan penilaian SAKIP, seperti di area Perencanaan telah dibuat Rencana Anggaran 2024, Reviu Renstra Puslatluh KP Tahun 2024, DIPA lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Matrik Cascading IKU, Rencana Aksi, dan Matrik Target Capaian IKU, sampai dengan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai. Untuk Area Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan pengukuran kinerja, dan dilakukan reviu secara berjenjang dan telah dituangkan dalam aplikasi kinerja. Untuk Pelaporan kinerja selain laporan mingguan, juga telah disusun pelaporan kinerja.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan Anggaran Lingkup Puslatluh KP Sampai dengan tahun 2024, Puslatluh KP melaksanakan DIPA TA. 2024 dengan total anggaran Lingkup Puslatluh KP sebesar Rp.730.184.111.000,- dan Pagu Puslatluh KP sebesar Rp. 17.042.302.000,-. Adapun Realisasi sampai dengan 15 April 2024 tahun anggaran 2024 adalah realisasi anggaran pada DIPA Lingkup Puslatluh KP Rp. 170.576.006.480,- (23,80%) dan Realisasi Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 2.279.600.356 (13,38 %). Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP merupakan gabungan dari kinerja satuan pelatihan dan penyuluhan KP, maka pagu dan realisasi juga merupakan gabungan dari seluruh satuan pelatihan dan penyuluhan KP.

**Tabel 28. Realisasi Anggaran lingkup Puslatluh KP**

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	OUTPUT	KODE	ANGGARAN PAGU	REALISASI ANGGARAN	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang teresap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	2375.SC C.001	59.384.560.000	20.915.649.624	35,22
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)					
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)					
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	2375.DD C.001	699.780.000	11.273.200	1,61
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kaji Terap)	2375.AB W.001	717.156.000	0	-
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)					
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	2375.AFA .001	4.000.000.000	330.641.405	8,27
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)					
56	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	2375.QD D.001	75.700.000.000	14.499.855.494	19,15
		10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)					

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	N O	IKU	OUTPUT	KODE	ANGGARAN PAGU	REALISASI ANGGARAN	%
		11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk (Kelompok)					
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)					
7	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	Masyarakat KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan	2375.QD D.002	27.265.225.000	512.327.853	1,88
		14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)					
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2375.RAL .001	4.528.118.000	1.095.219.940	24,19
		16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2375.RB Q.001	1.000.000.000	316.945.200	31,69
9	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten	4345.EBC .996	5.500.000.000	127.898.520	2,33
10	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	Layanan Dukungan Manajemen Satker	WA.2378	551.389.272.000	132.766.195.244	24,08
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)					
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)					
		21	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)					
		22	Persentase unit kerja Puslatluh KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)					
		23	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)					
		24	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Puslatluh (%)					
		25	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)					

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	OUTPUT	KODE	ANGGARAN PAGU	REALISASI ANGGARAN	%
		26	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Puslatluh KP (Inovasi)					
		27	Penilaian Mandiri SAKIP Puslatluh KP (Nilai)					

Secara umum kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2024 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

- a) Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran/rencana operasional kegiatan yang sudah disusun;
- b) Perencanaan yang cermat terkait jadwal kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi deviasi yang tinggi antara rencana penggunaan anggaran dan realisasinya;
- c) Untuk penghematan anggaran, memantau dan memastikan bahwa target yang sudah ditetapkan dalam renja tetap sejalan

### 3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Puslatluh KP

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi maka dapat ditelaah lebih lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya pemborosan anggaran.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

Pada peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa batas maksimum nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimum adalah -20%. Dengan asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin efisiensinya mendekati 20% maka kinerja kegiatan dan anggaran semakin baik, begitu pula sebaliknya.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Tahun 2024 adalah 118,57% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



### 4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun secara umum kinerja untuk triwulan I tahun 2024 ini Puslatluh KP telah mampu merealisasikan target kinerjanya, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dengan rekomendasi sebagai alternatif solusi demi tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan sampai dengan Triwulan 1 tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu Data Dukung capaian masih belum rapi dan seragam dalam pengisian matrik capaiannya.

Rekomendasikan untuk meningkatkan capaian kinerja Puslatluh pada Triwulan mendatang, yaitu:

1. IKU Kelompok yang ditingkatkan kelasnya, IKU Kelompok yang dibentuk dan IKU lainnya yang pengukurannya tahunan perlu dimonitoring secara berkala oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Satminkal agar capaian akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
2. Verifikasi data dukung yang ribuan memerlukan SDM dan Aplikasi digital dalam verifikasi data dukungnya serta adanya monitoring data dukungnya secara bulanan.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUBTEL [hrdm@kkp.go.id](mailto:hrdm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**  
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radiarta**  
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

**I Nyoman Radiarta**

Pihak Pertama  
Kepala Pusat Pelatihan dan  
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

**Lilly Aprilya Pregiwati**

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Ketua Tim Kerja Program, Sekretariat	
2.	Ketua Tim Kerja Dukman Puslatluh	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	35.173
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Miliar)	13,416
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.450
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	147
		6	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widyia (paket)	5
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	8
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
56	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh (Kelompok)	47.500
		10	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	2.000
		11	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk (Kelompok)	4.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.264
7	Terselenggaranya Percantohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	14
		14	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percantohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IND	TARGET 2024
8	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	6
		16	Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	5
9	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	5.165
10	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejarling dan/atau kerjasama lingkup Puslatlub yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	94
		22	Persentase unit kerja Puslatlub KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		23	Indeks Profesionalitas ASN Puslatlub KP (Indeks)	61
		24	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Puslatlub (%)	≤ 0,5
		25	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslatlub KP (%)	82
		26	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Puslatlub KP (Inovasi)	1
		27	Penilaian Mandiri SAKIP Puslatlub KP (Nilai)	81

### Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 173.294.839.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 5.500.000.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	Rp 551.389.272.000
<b>Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP</b>		<b>Rp 730.184.111.000</b>

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radlanta

Jakarta, 27 Desember 2023  
Pihak Pertama  
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

  
Lily Aprilya Pregiwati